

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA-PD)
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2023**



**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan suatu rincian pencapaian tujuan dan sasaran dari Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016-2021 yang dilaksanakan selama satu tahun. Sedangkan Rencana Strategis adalah rencana kerja selama 5 (lima) tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan dan sasaran suatu organisasi/instansi beserta pencapaiannya. Setiap organisasi atau instansi selayaknya mempunyai suatu dokumen perencanaan menyangkut kinerja organisasinya yang memiliki peran sebagai dasar tuntunan dalam penetapan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan sehingga apa yang telah dijadikan tujuan organisasi/instansi dapat tercapai dan terkendali dengan baik.

Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah yang memuat kebijakan dan program/ kegiatan dalam satu tahun yang akan digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023 serta untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Perkiraan capaian tahun berjalan. Semua kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan keberhasilan tersusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) ini, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dan Tim Penyusun RKPD yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyelesaikan penyusunan dengan baik.

Demikian RKPD Kesbangpol Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Purbalingga, 2022
KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

SADONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731108 199303 1 00

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	

BAB I. Pendahuluan.

1.1 Latar Belakang	
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	
1.3 Maksud dan Tujuan	
1.4 Sistematika Penyusunan.....	

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;	
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.	
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;	
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga;	
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;	

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;	
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;	

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

4.1 Program dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif	
---	--

BAB V. PENUTUP

**RENCANA KERJA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2023**

**BAB I
P E N D A H U L U A N**

1.1 Latar Belakang

Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik merupakan salah satu aspek dari pembangunan nasional, bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri. Pembangunan bidang tersebut dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat. Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan program dan kegiatan pembangunan tersebut secara cermat, tepat, dan akurat maka diperlukan adanya suatu perencanaan yang baik.

Di Indonesia sistem perencanaan pembangunan diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa sistem perencanaan pembangunan merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sebagai konsekuensi dari kebijakan desentralisasi dengan adanya pemberian otonomi daerah, daerah memiliki hak dan kewajiban untuk membuat suatu dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut merupakan suatu sistem perencanaan pembangunan yang dibuat oleh daerah, yang merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Dengan kata lain, perencanaan pembangunan daerah merupakan sub-sistem dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

Cakupan perencanaan pembangunan nasional harus memperhatikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Perencanaan yang disusun dari tingkat pusat sampai daerah memiliki beberapa jenjang di antaranya rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, menyebutkan bahwa setiap satuan perangkat Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang.

Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Purbalingga yaitu **“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”**, yang menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah.

Dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disamping berfungsi sebagai pedoman kerja juga diharapkan mampu menyatukan visi, misi, persepsi, strategi seluruh aparat Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam membina, melayani, dan memfasilitasi pembangunan dan pemberdayaan menuju masyarakat yang mandiri, serta untuk dapat mengevaluasi kinerja Perangkat Daerah ditahun-tahun sebelumnya dan diharapkan untuk bisa memacu kinerja pada tahun yang akan datang, terutama peningkatan kualitas sumber daya manusia pada Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah ini merupakan dokumen rencana pembangunan Perangkat Daerah yang berjangka waktu satu tahun guna mengoperasionalkan Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) yang disertai upaya mempertahankan dan meningkatkan sasaran kinerja pelayanan masyarakat yang sudah tercapai oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dalam anggaran yang menjadi dasar dalam penetapan Rencana Kerja Anggaran (RKA).

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ini, adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 01);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

- Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 97);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 98);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105)
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Purbalingga (Bab VIII Pasal 23 , 24, 25 dan 26);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
 34. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesbangpol (Bab II Pasal 2, Bab III Pasal 3,4,5,6,7,8,9 dan 10).
 35. Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dimaksudkan untuk :

- a. Sebagai arahan kebijakan dan strategi Kantor Kesbangpol dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Memberikan kerangka dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tolok ukur pertanggungjawaban Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Bupati;
- c. Menjamin sinergitas, sinkronisasi dan integritas Rencana Kerja dengan Renstra Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dengan RPJMD Kabupaten Purbalingga tahun 2021-2026.
- d. Sebagai tolok ukur akuntabilitas kinerja Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga pada tahun 2023

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2021-2026 adalah:

- a. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesbangpol;
- b. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan;
- c. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen yang tertuang dalam dokumen Renstra guna dijabarkan ke dalam Renja dan RAPBD;
- d. Untuk menjamin sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD Kabupaten Purbalingga.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

- 2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Capaian Renstra Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021;
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Purbalingga;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

BAB III. Tujuan dan Sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga;

BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

- 4.1 Program dan Kegiatan Serta Pagu Indikatif

BAB V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2021

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan Capaian Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga merupakan penjabaran Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Purbalingga 2016-2021.

Kinerja Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan Kegiatan. Program dan Kegiatan yang termuat dalam Renstra Tahun 2016 - 2021 belum seluruhnya dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penghematan anggaran, efisiensi kinerja, anggaran yang melebihi kebutuhan riil SKPD dan keterbatasan waktu kegiatan dan efek pandemi virus COVID-19 yang tak kunjung berhenti.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga pada Tahun Anggaran 2021 Pada tahun 2021 program - program prioritas Kantor Kesbangpol Kabupaten Purbalingga diuraikan dalam 6 Program, 11 Kegiatan dan 32 sub kegiatan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan termasuk dalam Urusan Pemerintahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah
2. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
 3. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
 4. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
 5. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
 6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga tahun lalu dan capaian renstra tertuang dalam tabel dibawah ini:

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KANTOR KESATUAN
BANGSA

Lembar :
.....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM									
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				5.001.676.100	4.499.187.841	89,9		6.567.669.000	
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100%	96,34%	1.981.767.100	1.809.680.451	91,32	100%	3.222.194.000	100

	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti			1.641.873.000	1.504.264.680	91,34		1.660.322.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	35 ASN	13 ASN	1.480.363.000	1.352.131.401	91,34	13 ASN	1.500.532.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri	200 kali	65 kali	72.210.000	66.701.779	92,37	103 kali	61.340.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersedianya honor pengelolaan keuangan, pejabat pengadaan, pemeriksa hasil pekerjaan, honor operator dan PTT			88.000.000	84.131.500	95,60	6 orang	-	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya SPM, LRA, dan Laporan keuangan	8 dok		1.300.000	1.300.000	100,00	8 dok	-	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan layanan kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			-	-	0,00		-	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya peserta diklat	10 orang	0	-	-	0,00	N/A	-	100

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum operasional kantor	12 bulan		116.885.000	108.308.178	99,36	12 bulan	57.423.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya perlengkapan listrik	12 bulan		2.035.000	2.022.000	99,36	12 bulan	1.035.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	12 bulan		5.000.000	5.000.000	100,00	12 bulan	-	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	12 bulan		69.745.000	61.303.378	87,90	12 bulan	37.988.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya jasa cetak dan penggandaan	12 bulan		7.500.000	7.500.000	100,00	12 bulan	-	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya surat kabar/majalah	12 bulan		2.040.000	1.980.000	97,06	12 bulan	2.400.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 bulan		20.825.000	20.825.000	100,00	12 bulan	-	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan tamu	12 bulan		8.000.000	7.962.800	99,54	12 bulan	12.000.000	100

1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya jamuan rapat	12 bulan		1.740.000	1.715.000	98,56	12 bulan	4.000.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	100%		15.350.000	12.843.000	0,00	100%	-	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	2 unit		-	-	0,00	2 unit	-	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin lainnya	2 orang		15.350.000	12.843.000	83,67	2 orang	-	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan		49.501.100	31.653.493	100,00	12 bulan	97.782.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya perangko, materai, jasa pos dan pengiriman	12 bulan		240.000	240.000	100,00	12 bulan	1.000.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan		49.261.100	31.413.493	63,77	12 bulan	90.782.000	100

8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	terpeliharanya peralatan kantor	12 bulan		-	-	0,00	12 bulan	6.000.000	100
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 bulan		150.218.000	145.551.300	94,25	12 bulan	137.250.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya pemeliharaan dinas/lapangan dan jasa pengemudi	12 bulan		80.518.000	75.886.300	94,25	12 bulan	117.150.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesinnya lainnya	12 bulan		9.700.000	9.665.000	99,64	12 bulan	8.100.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan		60.000.000	60.000.000	100,00	12 bulan	12.000.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100		7.940.000	7.059.800	84,31	100	7.950.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan yang diserahkan tepat waktu sesuai ketentuan	100		5.610.000	4.729.800	84,31	100	5.620.000	100

8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen renstra dan renja	2 dok		2.330.000	2.330.000	100,00	2 dokumen	2.330.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	31,9 per 10.000		78.674.000	25.694.000	32,66	31,9 per 10.000		100
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah rekomendasi terkait Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang ditindaklanjuti</i>	12 dok		78.674.000	25.694.000	32,66	12 dok		100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 02.2.01.02	<i>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	<i>Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	18 keg		78.674.000	25.694.000	32,66	18 keg		100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	31,9 per 10.000		1.301.048.000	1.285.104.000	98,77	31,9 per 10.000		100

8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	<i>Jumlah rekomendasi terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang ditindaklanjuti</i>	12 dok		1.301.048.000	1.285.104.000	98,77	12 dok	1.842.188.000	100
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 03.2.01.03	<i>Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	12 keg		1.301.048.000	1.285.104.000	98,77	12 keg	1.842.188.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase ormas yang terbina	28,00%		553.511.000	506.720.890	91,55			100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi	<i>Jumlah rekomendasi terkait pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi</i>	12 dok		553.511.000	506.720.890	84,83		634.350.000	100

	Kemasyarakatan	Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti								
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	12 keg		141.873.000	120.356.500	84,83		267.350.000	100
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 04.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi, Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing	14 keg		411.638.000	386.364.390	93,86		367.000.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya	31,9 per 10.000		104.995.000	101.912.500	97,06	31,9 per 10.000		100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah rekomendasi terkait Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditindaklanjuti	12 dok		104.995.000	101.912.500	97,06	12 dok	296.875.000	100

8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 05.2.01.03	<i>Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	18 keg		104.995.000	101.912.500	97,06	18 keg	296.875.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Jumlah Potensi Konflik yang terpantau	30		981.681.000	770.076.000	78,44	50		100
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Jumlah laporan bulanan potensi kerawanan sosial dan Jumlah laporan deteksi dini konflik yang terjadi di wilayah</i>	12 keg		981.681.000	770.076.000	95,44	12 keg	1.156.820.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.01	<i>Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	12 keg		590.980.000	564.006.000	95,44	12 keg	528.820.000	100
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.04	<i>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan</i>	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitas Kelembagaan Bidang	24 keg		326.870.000	149.440.000	45,72	24 keg	553.000.000	100

	<i>Konflik di Daerah</i>	Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah								
8.01 . 8-01.0-00.0-00.01 . 06.2.01.05	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan</i>	Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan Serta Penanganan Konflik di Daerah	12 keg		63.831.000	56.630.000	88,72	12 keg	75.000.000	100

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di atas sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dan 2022.

Secara umum, target kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2021 dapat tercapai meskipun belum optimal. Namun dapat disimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan kurang optimalnya capaian target kinerja, antara lain keterbatasan anggaran, sinkronisasi kebutuhan antar lembaga, standarisasi kebutuhan pada kegiatan wajib Perangkat Daerah, manajemen keuangan Perangkat Daerah dan perlunya bimbingan dan pembinaan yang berkelanjutan/terus menerus mengingat kualitas dan kuantitas SDM yang terbatas.

Berdasarkan evaluasi Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa semua program/kegiatan terpenuhi realisasinya. Hal ini dikarenakan adanya perencanaan yang cukup baik di antara sub bagian maupun seksi-seksi yang ada di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Implikasinya adalah perlunya dijaga ketertiban koordinasi supaya dapat mempertahankan pelayanan dan penyediaan data pelayanan yang akurat dan inovatif.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

Pada bagian ini disajikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan Kantor Kesbangpol merupakan unsur pendukung pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pembinaan kesatuan bangsa, dan politik yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Kesbangpol mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan kesatuan bangsa, kemasyarakatan, dan politik berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor Kesbangpol mempunyai fungsi :

- a. penetapan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa, dan Politik;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, pemberian bimbingan, pembinaan dan pengawasan dibidang Kesatuan Bangsa, dan Politik;
- c. pelaksanaan perumusan kebijakan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. pelaksanaan penguatan nilai-nilai kebangsaan;
- e. fasilitasi dan pengelolaan dinamika politik, ekonomi dan sosial budaya;
- f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- g. mengadakan fasilitasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga memberikan pelayanan-pelayanan kepada masyarakat sebagai berikut :

1. Kepala Kantor mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Kantor mempunyai fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan ketatausahaan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan ketatausahaan;
 - c. pelaksanaan tugas dibidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik, pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik serta melaksanakan ketatausahaan;
 - d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Kepala Subbagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melakukan sebagian tugas Kepala Kantor dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang pelayanan ketatausahaan yang meliputi pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan Keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi dibidang Pembinaan dan Pengawasan, penyelenggaraan urusan Keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan
- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi di bidang pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat menyurat, kearsipan, organisasi dan tatalaksana rumah tangga, perlengkapan, pengkoordinasian penyusunan program dan pelaporan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa

Kepala Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Kesatuan Bangsa yang meliputi penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penguatan dan peningkatan kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, menumbuh kembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, fasilitasi badan koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Seksi Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan kebijakan teknis penguatan dan peningkatan kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan, menumbuh kembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, fasilitasi badan koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitas penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan kebijakan teknis penguatan dan peningkatan kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menumbuh kembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, badan koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat;
- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan kebijakan teknis penguatan dan peningkatan kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menumbuh- kembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang

asing dan warga negara asing, badan koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat;

- d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi d bidang Penyusunan Kebijakan Teknis Penguatan dan Peningkatan Kewaspadaan terhadap nilai-nilai idologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan menumbuhkembangkan rasa kebangsaan, kerukunan umat beragama, pengawasan orang asing dan warga negara asing, badan koordinasi informasi keamanan dan ketertiban umum dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kelompok masyarakat;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Seksi Pembinaan Sosial Politik

Kepala Seksi Pembinaan Sosial Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Kantor dalam memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas dibidang Ketahanan Bangsa yang meliputi penyiapan bahan penyusunan program kebijakan teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Sosial Politik, mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan-bahan penyusunan program kebijakan teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol;
- b. pengumpulan bahan-bahan koordinasi penyusunan program kebijakan teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasure PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol;

- c. pengolahan/analisa bahan-bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan guna memberikan saran/masukan pertimbangan kepada pimpinan dalam bidang penyusunan program kebijakan teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasureve PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol;
 - d. pengurusan dokumen/bahan-bahan koordinasi dibidang Penyusunan Program Kebijakan Teknis, pemilihan umum, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, pembinaan ormas, LSM dan partai politik, rekomendasi kegiatan prasureve PKL, KKL, penelitian LSM, lembaga kemasyarakatan/ormas dan parpol;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kesbangpol yang bersifat teknis sesuai dengan jenis keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai bidang keahlian dan ketrampilannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Kesbangpol. Jumlah Pejabat Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Berikut adalah pencapaian kinerja pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Kabupaten Purbalingga, dapat dilihat berikut ini :



2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan melaksanakan pelayanan pada urusan kesatuan bangsa dan politik. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik dibidang pembinaan kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan ketatausahaan. Pemetaan permasalahan pelayanan Kesbangpol Kabupaten Purbalingga dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Dalam Menjaga Kesatuan Bangsa dan Politik	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa	<p>Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme</p> <p>Masih adanya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi</p> <p>Masifnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya degradasi moral dan budaya di masyarakat.</p> <p>Menurunnya tingkat moderasi dan toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan</p> <p>Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial</p>

			Berkurangnya ketahanan ekonomi masyarakat, yang bisa menimbulkan kerawanan sosial dan konflik di masyarakat.
		Kuranginya pemahaman masyarakat terhadap politik	Belum optimalnya peran partai politik dalam proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi
			Belum optimalnya pemahaman tentang etika dan budaya politik demokratis
			Belum optimalnya tingkat partisipasi politik masyarakat dibanding nasional.
			Masih terjadinya money politik dalam pelaksanaan pemilu
2.	Penatausahaan administrasi yang belum optimal	Lemahnya tingkat pemahaman penatausahaan dan administrasi	Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia di kantor kesatuan bangsa dan politik baik secara kuantitas maupun kualitas
			Rendahnya pemahaman tentang peraturan sistim dan prosedur penata usahaan dan administrasi..
			Belum optimalnya pelaksanaan tugas-tugas internal. hal ini disebabkan belum memenuhi standar operasional prosedur kerja.
			Terbatasnya sarana dan prasarana yang ideal dalam menunjang aktivitas pekerjaan. hal tersebut akan berdampak kepada kecepatan penyelesaian tugas

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah.
- b. Program prioritas pembangunan daerah dan
- c. Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS.

Rancangan awal yang tersusun pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga telah disesuaikan dengan Perencanaan Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Strategis Tahun 2021-2026 memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Dokumen rencana renstra mencakup juga informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen renstra ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel T-C.31
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lembar
..... dari
.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Kabupaten Purbalingga				UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	Kabupaten Purbalingga				
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.567.669.000	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				6.823.711.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.189.127.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.195.169.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	7.950.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	100	7.950.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusnya dokumen renstra dan renja	2 dokumen	5.620.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusnya dokumen renstra dan renja	2 dokumen	5.620.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan RB) yang tersusun	6 dokumen	2.330.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen evaluasi (LKPJ, LKJIP, Laporan Bulanan, Laporan Pengendalian Renja, SPIP dan RB) yang tersusun	6 dokumen	2.330.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	1.660.322.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Prosentase temuan pengelolaan anggaran yang ditindaklanjuti	100	1.578.364.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	13 ASN	1.500.532.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang Gaji dan Tunjangannya terbayar tepat waktu	13 ASN	1.418.574.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri	95 kali	61.340.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah kunjungan lapangan/survey/koordinasi/undangan/SPPD dalam kota dan dalam negeri	95 kali	61.340.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Tersusunnya SPM, LR, dan Laporan Keuangan	500 dokumen	98.450.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Tersusunnya SPM, LR, dan Laporan Keuangan	500 dokumen	98.450.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	<i>100%</i>	8.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan administrasi aset milik daerah sesuai ketentuan	<i>100%</i>	8.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersedianya honor untuk penatausahaan Barang	2 orang	8.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Tersedianya honor untuk penatausahaan Barang	2 orang	8.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Ketersediaan Kegiatan Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	64.623.000	Admiinistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Prosentase ketersediaan kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	10.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Perlengkapan Listrik	12 bulan	1.035.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	2 orang	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	37.988.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Prosentase Ketersediaan Kegiatan Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	64.623.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Surat Kabar	12 exp	2.400.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya Perlengkapan Listrik	12 bulan	1.035.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Jamuan Tamu	12 bulan	12.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 bulan	37.988.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Jamuan Rapat	12 bulan	4.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Tersedianya Surat Kabar	12 exp	2.400.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Tersedianya Honor Operator SIMDA, SIM Aset, dan SIPD	12 bulan	7.200.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Tersedianya Jamuan Tamu	12 bulan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Ketersediaan Kegiatan Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	310.982.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Jamuan Rapat	12 bulan	4.000.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Perangko, Materai, dan Jasa Pengiriman	12 bulan	1.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Tersedianya Honor Operator SIMDA, SIM Aset, dan SIPD	12 bulan	7.200.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 bulan	90.782.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Ketersediaan Kegiatan Kepegawaian, Administrasi Umum, dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	310.982.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 bulan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya Perangko, Materai, dan Jasa Pengiriman	12 bulan	1.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Kebersihan, Penjaga Malam, Operator Komputer, Pengemudi, dan Tenaga Teknis Lainnya	12 bulan	213.200.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	12 bulan	90.782.000	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	137.250.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Terpeliharanya Peralatan Kantor	12 bulan	6.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/lapangan dan jasa pengemudi	12 bulan	117.150.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya Jasa Kebersihan, Penjaga Malam, Operator Komputer, Pengemudi, dan Tenaga Teknis Lainnya	12 bulan	213.200.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	8.100.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Prosentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	137.250.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	12.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya pemeliharaan kendaraan dinas/lapangan dan jasa pengemudi	12 bulan	117.150.000	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				146.809.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	12 bulan	8.100.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanjapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan masyarakat yang memperoleh pengkatan wawasan kebangsaan	33 per 10.000 penduduk	146.809.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	12 bulan	12.000.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 kegiatan	65.000.000	Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Tersedianya Peralatan dan Barang Milik Daerah		78.000.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18 kegiatan	76.809.000	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor		78.000.000	Pengadaan Laptop, PC, Printer, Scanner, dan Peralatan Pendukung lainnya
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 kegiatan	5.000.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				146.809.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				1.847.188.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan masyarakat yang memperoleh pengkatan wawasan kebangsaan		146.809.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik		Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		1.847.188.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaوران Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		65.000.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	12 kegiatan	1.842.188.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		76.809.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	18 kegiatan	5.000.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		5.000.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Prosentase ormas yang terbina	21%	639.350.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				2.097.188.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Rekomendasi terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	12 dokumen	639.350.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Cakupan masyarakat yang memperoleh Pembinaan Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		2.097.188.000	
	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	6 kegiatan	267.350.000	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah		1.842.188.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	3 kegiatan	367.000.000	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		5.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18 kegiatan	5.000.000	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		250.000.000	Desk Pemilu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Cakupan masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	33 per 10.000 penduduk	358.375.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Prosentase ormas yang terbina		639.350.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah rekomendasi terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	12 dokumen	358.375.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Jumlah Rekomendasi terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		639.350.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4 kegiatan	61.500.000	Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		267.350.000	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	19 kegiatan	296.875.000	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		367.000.000	560.000.000
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Jumlah Potensi Konflik yang Terpantau di Kabupaten Purbalingga	50 kejadian	1.386.820.000	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		5.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah laporan bulanan potensi kerawanan sosial dan jumlah laporan deteksi dini konflik yang terjadi di wilayah	12 dokumen	1.386.820.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Cakupan masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya		358.375.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 kegiatan	528.820.000	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Jumlah rekomendasi terkait Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		358.375.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 kegiatan	553.000.000	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		61.500.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	16 kegiatan	75.000.000	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		296.875.000	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 kegiatan	230.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Jumlah Potensi Konflik yang Terpantau di Kabupaten Purbalingga		1.386.820.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Jumlah laporan bulanan potensi kerawanan sosial dan jumlah laporan deteksi dini konflik yang terjadi di wilayah		1.386.820.000	
						Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah kegiatan terkait Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		528.820.000	
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kegiatan terkait Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		553.000.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

						<p>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>		<p>Jumlah kegiatan terkait Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</p>		75.000.000	
						<p>Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>		<p>Jumlah kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</p>		230.000.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Telaahan usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga ***“Purbalingga yang Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia”***. maka selaku organisasi perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 mengusulkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut ;

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2023
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			9.163.088.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesbangpol		3.290.900.000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			13.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.916.000.000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.418.574.000	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	195.000.000	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	21.000.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			8.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8.000.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			35.000.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	15.000.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	20.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			62.200.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.700.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	39.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	3.500.000	
	Penyediaan Bahan/Material		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.200.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4.800.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			693.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	500.000.000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	72.000.000	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			333.700.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	98.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	213.200.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			230.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	120.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	80.000.000	
	Pemeliharaan Mebel		Jumlah Mebel yang Dipelihara	5.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			497.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			497.000.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	85.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	95.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	37.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	35.000.000	
	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	245.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			2.182.188.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			2.182.188.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.842.188.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	250.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	90.000.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			745.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			745.000.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	270.000.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	370.000.000	

			Asing di Daerah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	75.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			434.000.000	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			434.000.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	62.000.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	-	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	300.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	36.000.000	

	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	36.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			2.014.000.000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			2.014.000.000	
	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	587.000.000	
	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	-	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	90.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	732.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	75.000.000	

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	
--	--	-------------	--

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURBALINGGA

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam upaya Menciptakan bentuk sinkronisasi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, maka diharapkan program/kegiatan yang telah direncanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo merupakan implementasi dari program nasional yang bertujuan memperkuat kesatuan dan persatuan nasional serta stabilitas politik dalam negeri yang dilandasi oleh semangat dan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 melalui pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, adapun kegiatan secara nasional dilaksanakan melalui melalui 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik;
2. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
3. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional;
4. Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
5. Fasilitasi Politik Dalam Negeri; serta
6. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi.

Sehingga diharapkan pada akhirnya program/kegiatan yang berjalan mampu berperan secara totalitas terhadap index pembangunan manusia di Kabupaten Purbalingga dan tepat sasaran. Hal ini kemudian menjadi dasar penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Maka Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki fungsi:

- a. Merumuskan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Mengadakan Pembinaan hubungan dengan Partai Politik, Partai Politik peserta Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Instansi maupun Lembaga Kemasyarakatan lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem politik ;
- c. Melakukan pembinaan wawasan kebangsaan, peningkatan kesadaran bela Negara, dan pembinaan kerukunan umat beragama ;
- d. Melaksanakan pembinaan pembauran bangsa serta pengawasan dan pemantauan kegiatan orang asing dan/ atau LSM asing ;
- e. Melakukan pengumpulan data dan informasi di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya untuk dikaji sebagai bahan masukan bagi Kepala Daerah dalam menciptakan suasana yang aman dan damai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- f. Memfasilitasi pelaksanaan kemajuan dan peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
- g. Mengadakan suatu perencanaan, koordinasi, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan dan berkelanjutan diarahkan pada upaya untuk mencapai dan mewujudkan Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu ***“Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia”***.

Mempedomani amanat Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pembangunan daerah menyusun Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja Pembangunan daerah (RKPD) disusun melalui pendekatan Politik, Teknokratik, Partisipatif, Bottom Up & Top Down Planning, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Dinamika Lingkungan Strategis yang berkembang.

RKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2021, memasuki pelaksanaan **Tahap Kedua** dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dan **Tahap Kedua** dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 – 2026 dan memperhatikan Visi – Misi Kepala Daerah Terpilih.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi di masa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dengan berlandaskan misi yang telah ditetapkan, maka kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam kurun tahun 2021 – 2026 menetapkan tujuan sebagai berikut : ” **Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat**”.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang

bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya masing- masing). Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Atas dasar arti dan makna penetapan sasaran dimaksud, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2021 – 2026, ditetapkan sasaran-sasaran sebagai berikut :

- a. Menurunnya potensi konflik dimasyarakat
- b. Meningkatnya kualitas kelembagaan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
- c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri

Berikut kami sajikan tabel tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KESBANGPOL KABUPATEN PURBALINGGA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	95
	Menurunnya potensi konflik dimasyarakat	Jumlah potensi konflik yang dilaporkan	Dokumen	45
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Kesbangpol	Nilai SAKIP	Indeks	68

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET 2022
Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap nilai nilai wawasan kebangsaan, partisipasi politik masyarakat		Persentase potensi konflik yang diredam tidak menjadi konflik	Persen	95
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam bidang politik dalam negeri	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu (presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota)	Persen	0

No	Program	Anggaran	Ket.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 2.189.127.000	
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp. 146.809.000	
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp. 1.847.188.000	
4.	Program Pengawasan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan	Rp. 639.350.000	
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Dan Sosial Budaya	Rp. 358.375.000	
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Rp. 1.386.820.000	

Tabel.T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023

dan Prakiraan Maju Tahun 2024

Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Lembar : dari
.....

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2023		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
8	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						
8	01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			5.661.649.300			5.661.649.300
8	01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.918.094.610			1.918.094.610
8	01 01 201 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.992.553			3.992.553

(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
8	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.332.447,66	dokumen renja	Dokumen	2.332.448
8	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.660.105,10	LKJIP, LKPJ, LKD, Laporan Triwulan	Laporan	1.660.105
8	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.484.316.048			1.484.316.048
8	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	1.417.999.000,00		Orang/bulan	1.417.999.000
8	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180 Dokumen	25.457.711,65	sppd dan laporan	Dokumen	25.457.712
8	01	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	350 Dokumen	40.859.336,68	Honor PA, PPK, PPTK, SA, Bendahara Pengeluaran	Dokumen	40.859.337
8	01	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.320.210			3.320.210
8	01	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.320.210,19	Pengurus Barang	Laporan	3.320.210
8	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.262.960			7.262.960

(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
8	01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	7.262.959,80	pengiriman peserta diklat kesatuan bangsa dan politik	Orang	7.262.960
8	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah			26.820.243			26.820.243
8	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	429.552,19	lampu	Paket	429.552
8	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.766.018,10	Fotokopi, Brosur	Paket	15.766.018
8	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	996.063,06	Koran/Majalah	Dokumen	996.063
8	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.980.315,29	Jamuan Tamu di dalam/luar kantor	Laporan	4.980.315
8	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.660.105,10	Makan Minum Rapat & Honor Narsum	Laporan	1.660.105
8	01	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	2.988.189,17	Operator SIMDA, SIMASET, SIPD	Dokumen	2.988.189

(1)				(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	
8	01	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			20.751.314		20.751.314	
8	01	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	20.751.313,70	laptop 3, printer 3, scanner	Unit	20.751.314
8	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			312.697.552			312.697.552
8	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.037.565,69	materai	Laporan	1.037.566
8	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	90.782.000,00	Tagihan Listrik, Air, Internet, Penambahan Bandwidth Internet	Laporan	90.782.000
8	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.677.986,07	Kegiatan seremonial hari_hari besar	Laporan	7.677.986
8	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	213.200.000,00	THL dgn kualifikasi 3 S1, 1 D3, 5 SLTA, 1 SLTP	Laporan	213.200.000
8	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			58.933.731			58.933.731

(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
8	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	49.803.152,88	R2 : 15, R4 : 6	Unit	49.803.153
8	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	4.150.262,74	pemeliharaan peralatan kantor	Unit	4.150.263
8	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.980.315,29	pemeliharaan rutin/pengecatan, membuat wc	Unit	4.980.315
8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			60.929.592			60.929.592
8	01	02	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			60.929.592			60.929.592
8	01	02	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	12 Dokumen	26.976.707,81	sosialisasi Ideologi Pancasila di 18 kecamatan	Dokumen	26.976.708

(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
8	01	02	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	102 Orang	31.877.753,08	Rapat Koordinasi dengan kasi pemrantibum 3 bulanan	Laporan	31.877.753
8	01	02	201	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	12 Laporan	2.075.131,37	monitoring kegiatan	Keluarga	2.075.131
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.778.771.692			1.778.771.692
8	01	03	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1.778.771.692			1.778.771.692

(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
8	01	03	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 Keg	1.672.939.991,66	Hibah Parpol, BinteK Adm Parpol, Sosialisasi Pendidikan Politik	Orang	1.672.939.992
8	01	03	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	103.756.568,50	Pendidikan Politik sasaran Pemilih Pemula (roadshow ke SLTA)	Orang	103.756.569
8	01	03	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	18 Laporan	2.075.131,37	monitoring kegiatan	Laporan	2.075.131

(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			651.321.360			651.321.360
8	01	04	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			651.321.360			651.321.360
8	01	04	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	256.475.338,43	timdu pengawasan ormas	Dokumen	256.475.338
8	01	04	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1000 Orang	392.770.889,78	hibah dan fasilitasi ormas	Orang	392.770.890

(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
8	01	04	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	2.075.131,37	monitoring kegiatan	Laporan	2.075.131
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			150.810.172			150.810.172
8	01	05	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			150.810.172			150.810.172
8	01	05	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	25.524.115,85	ATK, Makan minum rapat, Perjalanan Dinas	Dokumen	25.524.116

(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
8	01	05	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 Orang	123.210.925,10	Sos P4GN, Sos Peraturan Radikalisme, Hibah FKUB	Orang	123.210.925
8	01	05	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	2.075.131,37	monitoring kegiatan	Laporan	2.075.131
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1.101.721.874			1.101.721.874
8	01	06	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			1.101.721.874			1.101.721.874

(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
8	01	06	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	494.014.063,30	wasdinda, timdu konflik sosial	Dokumen	494.014.063
8	01	06	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2880 Orang	449.997.826,33	diklat intelijen dasar sasaran kecamatan, pemantauan orang asing, FKDM	Orang	449.997.826

(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
8	01	06	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 Laporan	39.427.496,03	pamtup vip/hari besar nasional/keagamaan	Laporan	39.427.496
8	01	06	201	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	118.282.488,09	rapat forkopimda dan perjalanan dinas	Dokumen	118.282.488

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PURBALINGGA

4.1 Program dan Kegiatan serta pagu indikatif.

Rencana Kerja SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.

Rencana program dan kegiatan merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama Program/Kegiatan, Indikator Kinerja Program/Kegiatan, Tahun Rencana yang meliputi Lokasi, Target Capaian Kinerja dan Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif, Klasifikasi Program dan Kegiatan dituangkan secara lengkap dalam Matrik Rencana Program dan Kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun berdasarkan hasil analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Program dan kegiatan Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023, didasarkan pada beberapa pendekatan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yaitu :

1. Pendekatan Teknokratis, yaitu pertimbangan analisis rasional kondisi internal dan eksternal sesuai tugas dan fungsi lembaga;
2. Pendekatan Politis, yaitu memenuhi Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih;
3. Pendekatan Partisipatif, yaitu mempertimbangkan permasalahan dan aspirasi dari komunitas di wilayahnya;
4. Pendekatan Top Down, yaitu melakukan sinkronisasi dengan perencanaan pembangunan pemerintah tingkat atasnya;
5. Pendekatan Bottom Up, yaitu mempertimbangan peta permasalahan pemerintah tingkat di bawahnya;

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan

kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 mengacu pada DPA Tahun 2022.

Untuk lebih jelasnya mengenai Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2023 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dengan tahun sebelumnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023
Kabupaten Purbalingga

Nama Perangkat Daerah : KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (sub output)	Rencana Tahun 2023	
							Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)					(2)	(3)	(5)	(6)
8					URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			5.925.773.000
8	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			1.982.225.000
8	01	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.992.000
8	01	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2.332.000
8	01	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	1.660.000

(1)				(2)	(3)	(5)	(6)	
8	01	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.509.316.000
8	01	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/ bulan	1.417.999.000
8	01	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	180 Dokumen	50.458.000
8	01	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	350 Dokumen	40.859.000
8	01	01	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			3.320.000
8	01	01	203	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan	3.320.000
8	01	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			7.262.000
8	01	01	205	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	7.262.000
8	01	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah			26.841.000
8	01	01	206	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	429.000
8	01	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	15.788.000
8	01	01	206	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	12 Dokumen	996.000
8	01	01	206	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	4.980.000

(1)					(2)	(3)	(5)	(6)
8	01	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	1.660.000
8	01	01	206	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	2.988.000
8	01	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			318.817.000
8	01	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.037.000
8	01	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	96.902.000
8	01	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	7.678.000
8	01	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	213.200.000
8	01	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			112.677.000
8	01	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	21 Unit	103.547.000
8	01	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit	4.150.000

8	01	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	4.980.000
(1)					(2)	(3)	(5)	(6)
8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			60.928.000
8	01	02	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			60.928.000
8	01	02	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	12 Dokumen	26.976.000
8	01	02	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	102 Orang	31.877.000
8	01	02	201	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	12 Laporan	2.075.000

						Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
(1)					(2)	(3)	(5)	(6)
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			1.778.770.000
8	01	03	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			1.778.770.000
8	01	03	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3 keg	1.672.939.000

8	01	03	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1000 Orang	103.756.000
(1)					(2)	(3)	(5)	(6)
8	01	03	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	18 Laporan	2.075.000
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			651.320.000
8	01	04	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			651.320.000
8	01	04	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	256.475.000

8	01	04	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1000 Orang	392.770.000
(1)					(2)	(3)	(5)	(6)
8	01	04	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	12 Laporan	2.075.000
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			150.809.000
8	01	05	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			150.809.000
8	01	05	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	12 Dokumen	25.524.000

8	01	05	201	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	900 Orang	123.210.000
(1)					(2)	(3)	(5)	(6)
8	01	05	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	12 Laporan	2.075.000
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			1.301.721.000
8	01	06	201		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik			1.301.721.000

					Sosial				
8	01	06	201	01	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	12	Dokumen	494.014.000
(1)					(2)	(3)	(5)	(6)	
8	01	06	201	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	2880	Orang	449.998.000
8	01	06	201	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12	Laporan	39.427.000

8	01	06	201	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12 Dokumen	318.282.000
---	----	----	-----	----	---	--	------------	-------------

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 disusun sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas terhadap dokumen perencanaan pembangunan pada skala prioritas pembangunan Tingkat Propinsi dan Nasional, baik yang berdimensi jangka menengah ataupun jangka panjang.

Rencana Kerja ini memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga pada Tahun 2023.

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga sebagai Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dalam perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan yang bersifat strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa Lingkungan Internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta

Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor strategi yaitu tantangan dan peluang.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2023, yang juga digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. Namun demikian, jika dalam perjalanannya terjadi proses rasionalisasi anggaran yang berujung pada penurunan jumlah program/kegiatan, maka:

- a. Akan dilakukan penyesuaian berupa penundaan program/kegiatan yang memiliki bobot prioritas lebih rendah;
- b. Penurunan target capaian kinerja untuk menyesuaikan Rasionalisasi anggaran terhadap Program/Kegiatan yang diajukan dalam Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023.

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Purbalingga.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) melalui pelaksanaan Rencana Kinerja (Renja) Tahun 2023, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai catatan penting berikut ini:

1. Segera dilakukan Penetapan terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/Sosialisasi terhadap Renstra dan Renja ini ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan

komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat.

3. Menjaga konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin. Artinya segala aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi.
4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Tuhan Yang Maha Esa, semoga rencana kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Purbalingga yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing, Menuju Masyarakat yang Sejahtera yang Berkeadilan dan Berakhlak Mulia. Amin.

Purbalingga, 2022

KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA

SADONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19731108 199303 1 00

